

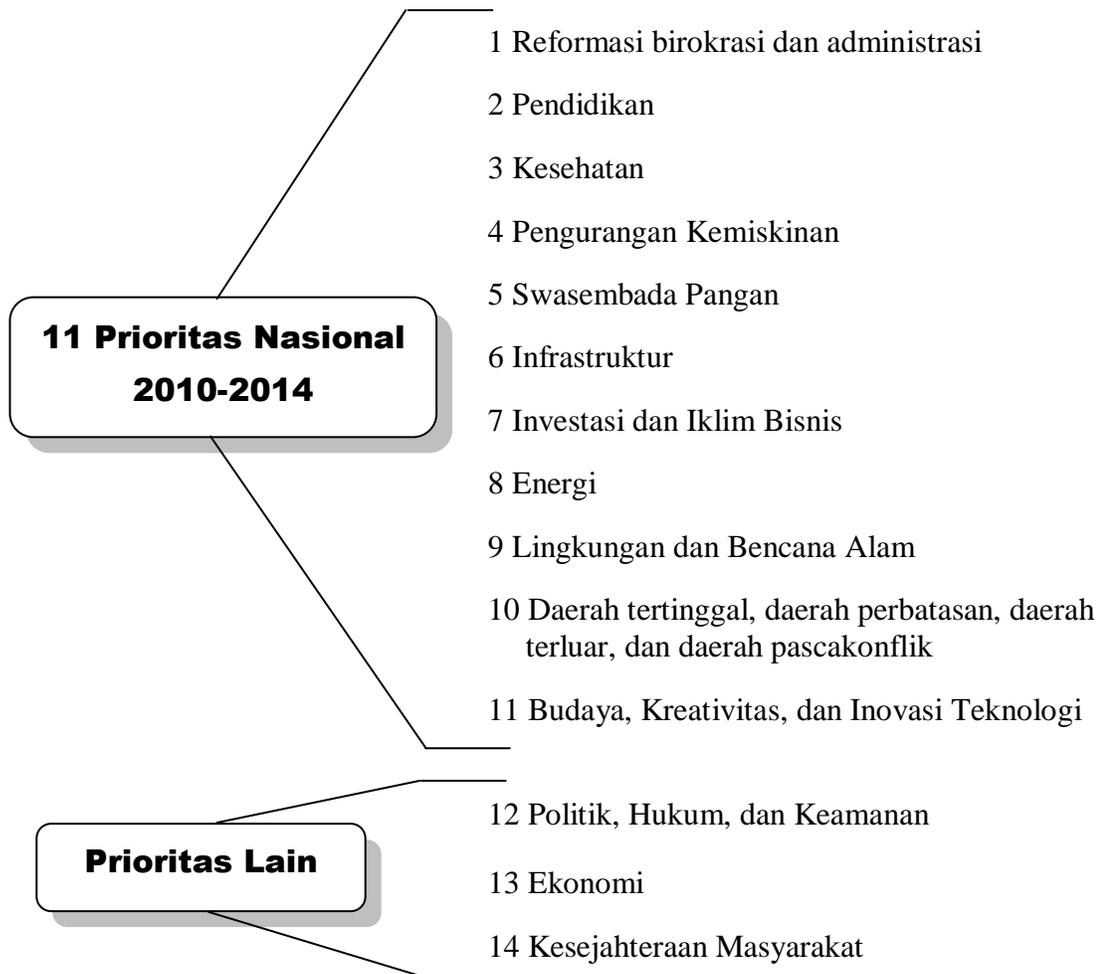
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Indonesia 2014 menurut SBY-B (Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono) dalam buku yang berjudul *Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan* (2009), adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Misinya adalah melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang perumusannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Arah pembangunan pemerintah pusat sejak 2004 lalu yakni tertuang dalam *triple track strategy*, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. *Track* pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. *Track* kedua adalah menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. *Track* ketiga adalah merevitalisasi pertanian, kehutanan, dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan. Berikut merupakan prioritas nasional kabinet Indonesia Bersatu II RPJMN 2010-2014:

Gambar 1.1. Bagan Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II RPJMN 2010-2014.



Sumber: Inpres No. 1/2010 dalam Mudrajad Kuncoro, 2008

Dalam sasaran program ekonomi nasional (2005-2009), salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan investasi, khususnya investasi sektor riil. Investasi atau penanaman modal yang dicapai haruslah memiliki daya saing penanaman modal. Salah satu ukuran daya saing nasional dalam kancah internasional adalah kemudahan berusaha – *ease of doing business* versi Bank Dunia. Bank dunia menggunakan sepuluh kriteria untuk menentukan peringkat daya saing setiap negara. Kesepuluh kriteria tersebut adalah: 1) *starting a business*, 2) *dealing with licenses*, 3) *employing*

workers, 4) registering property, 5) getting credit, 6) properting investors, 7) paying taxes, 8) trading across borders 9) enforcing contracts 10) closing a business.

Berdasarkan standar kriteria Bank Dunia tersebut daya saing Indonesia tergolong masih rendah. Pada 2009, Indonesia berada di peringkat 122 dari 183 negara yang disurvei. Posisi ini jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain sekawasan seperti: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. (Renstra Badan Penanaman Modal Provinsi Lampung, 2009)

Pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung investasi yang berdaya saing. Pemerintah berupaya membangun sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan keselamatan transportasi nasional secara terpadu, meningkatkan mobilitas dan distribusi nasional, membangun transportasi yang berkelanjutan, membangun transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah, dan sebagainya. Hasil yang dicapai adalah kondisi mantap jalan pada akhir tahun 2007 mencapai 28.417, 68 km atau sekitar 82%. Kondisi ini telah melampaui target awal sebesar 81 %. Walaupun demikian, berdasarkan kajian *World Economic Forum* (2009), tingkat daya saing (*competiveness*) infrastruktur Indonesia pada tahun 2008 berada pada peringkat ke-96 dari 134 negara. Posisi Indonesia jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (peringkat ke-18), Malaysia (19), Thailand (35), China (58). Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia tidak jauh berbeda dengan Vietnam (97). Peringkat Indonesia sedikit membaik pada tahun 2009 dengan menduduki peringkat ke-84. Peringkat daya saing infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Peringkat Daya Saing Infrastruktur Tahun 2008 dan 2009.

Negara	Peringkat 2008	Peringkat 2009
Korea Selatan	18	20
Malaysia	19	27
Thailand	35	41
China	58	66
Brasil	89	81
Indonesia	96	84
Vietnam	97	111
Argentina	84	94

Sumber: *World Economic Forum (2008), World Competitiveness Report (2009 – 2010)* dalam Mudrajad Kuncoro

Dari perspektif ekonomi, infrastruktur mencakup berikut. *Pertama*, infrastruktur transportasi seperti jalan, rel, pelabuhan, bandara. *Kedua*, infrastruktur ekonomi seperti bank, pasar, mal, pertokoan. *Ketiga*, infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan, pintu-pintu pengambilan dan distribusi air irigasi. *Keempat*, infrastruktur sosial seperti bangunan ibadah, balai pertemuan, dan pelayanan masyarakat. *Kelima*, infrastruktur kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan. *Keenam*, infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, jaringan listrik, POM bensin. *Ketujuh*, infrastruktur telekomunikasi, termasuk BTS, STO, jaringan telepon.

Tabel-tabel berikut ini menunjukkan kondisi akses dan stok infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dalam ASEAN+1.

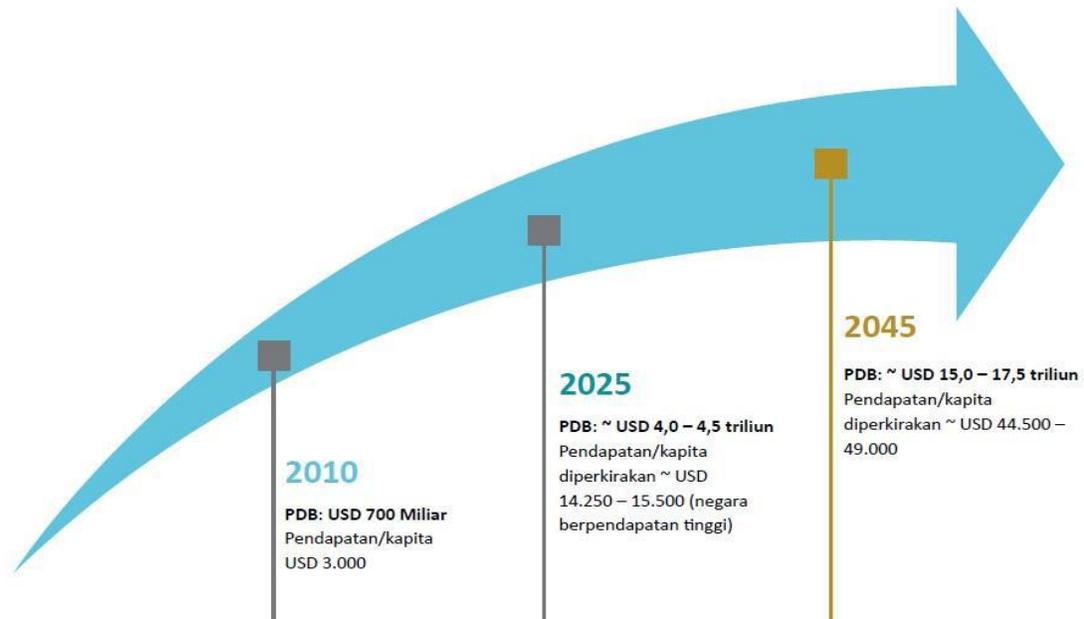
Tabel 1.2. Akses dan Stok Infrastruktur.

Negara	Akses Suplai Air Bersih	Akses Sanitasi	Akses Listrik	Akses Telepon	Akses Internet
Malaysia	93		7	62	34,4
Thailand	93	3	84	50	11,1
Filipina	86	83	79	31	4,4
Cina	76	39	9	42	6,3
Indonesia	78	55	55	13	3,8
Vietnam	49	25	81	9	4,3
Kamboja	44	22	17	4	0,2
Laos	58	30	41	3	0,3
Mongola	60	30	90	19	5,8

Sumber: Kompas (2009) dalam Mudrajad Kuncoro, 2008

Salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi adalah PDB. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional tahun 2045 adalah tingkat PDB sebesar USD15,0 – 17,5 triliun. Hal tersebut mustahil dicapai apabila iklim investasi tidak terjadi kestabilan dan pertumbuhan yang positif tidak tercapai dengan baik. Maka sebelum sasaran PDB tersebut dicapai, maka hal yang paling utama harus dilakukan adalah menggairahkan kegiatan ekonomi serta iklim investasi yang sehat. Berikut disajikan gambar aspirasi pencapaian PDB di Indonesia hingga tahun 2045 mendatang.

Gambar 1.2. Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia.



Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011

Pengairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini menyusul tampilnya rezim orde baru memegang tampuk pemerintahan. Sebelumnya, dalam pemerintahan orde lama, Indonesia sempat menentang kehadiran investasi dari luar negeri. Ketika itu tertanam keyakinan bahwa modal asing hanya akan menggerogoti kedaulatan negara. Undang-Undang tapi kemudian dilengkapi dan disempurnakan pada tahun 1970. UU

No.6/Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No.12/Tahun 1970.

Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan pemerintah, terutama sejak awal pelita IV atau tepatnya tahun 1984. Melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perizinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi,

serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu.

Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi penanam modal asing. Di samping dalam rangka menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 kelak. (Dadang Firmansyah, 2008)

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, peran daerah cukup menentukan dalam pembangunan nasional. Tujuan suatu daerah tertuang dalam suatu visi dan misi. Adapun visi Provinsi Lampung hingga tahun 2014 mendatang (RPJM D II) adalah “Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.” Sedangkan Misinya yakni:

1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEKS.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah.
6. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
7. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis.

8. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta bertatakelola baik.

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2007)

Provinsi Lampung yang merupakan salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi yang cukup baik, terutama potensi pada sumber daya alam. Dilihat dari segi potensi ekonomi, saat ini Lampung merupakan salah satu Provinsi sebagai lumbung pangan di Indonesia. (capaian kinerja pembangunan Provinsi Lampung, 2011). Selain itu secara letak geografis, Provinsi Lampung merupakan wikayah *hinterland* atau kawasan sekitar ibu kota Indonesia yaitu Jakarta dan provinsi paling selatan Pulau Sumatera. Dilihat dari potensi dan letak geografis, maka Provinsi Lampung seharusnya merupakan provinsi yang banyak diminati oleh penanam modal atau investor untuk melakukan investasi, terutama investasi sektor riil baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing. Berikut disajikan tabel indikator dan capaian kinerja Provinsi Lampung hingga 2014 mendatang.

Tabel 1.3. Indikator dan Capaian Kinerja Misi 1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Makro daerah						
	-Pertumbuhan ekonomi	%	5,75	6,3	5,7-6,7	5,8-6,8	5,9-6,9
	-Pertumbuhan investasi sektor riil	%	6	11,9	12,5	13	14,5
2	Inflasi	%	9,95	4,24	8	7	6

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2007

Investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi investasi berdasarkan hasil survey bank dunia:

Tabel 1.4. Faktor-faktor Penghambat Investasi.

No	Faktor-Faktor Penghambat	Persentase	Kendali Kewenangan
1	Ketidakpastian Pengaturan dan Kebijakan Ekonomi	23 Persen	Pusat
2	Ketidakstabilan Makro Ekonomi	18 Persen	Pusat
3	Perpajakan	17 Persen	Pusat
4	Keuangan	10 Persen	Pusat
5	Korupsi	10 Persen	Pusat dan Daerah
6	Infrastruktur	9 Persen	Pusat dan Daerah
7	Praktek Anti Persaingan	5 Persen	Pusat dan Daerah
8	Keahlian dan Pendidikan Tenaga Kerja	5 Persen	Pusat dan Daerah
9	Kriminalitas	3 Persen	Pusat dan Daerah

Sumber: Bank Dunia dalam <http://riaubisnis.com>

Jika diperhatikan faktor-faktor penghambat investasi di atas, maka salah satu penghambat terjadinya investasi adalah pada faktor infrastruktur dimana kendali kewenangan ada di pusat dan daerah dengan tingkat persentase sebesar 9%. Variabel infrastruktur memang bukanlah faktor utama sebagai penghambat investasi swasta. Namun penulis akan mengangkat variabel infrastruktur dalam penelitian ini karena seperti yang tertera pada tabel di atas dimana infrastruktur merupakan kendali kewenangan yang diatur oleh pusat dan daerah sehingga daerah juga memiliki peran dalam hal ini. Selain itu alasan penulis mengambil variabel infrastruktur dikarenakan

pada penelitian sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian dengan variabel infrastruktur. Maka dari hasil penelitian ini bisa membandingkan bagaimana kondisi dan peran infrastruktur terhadap investasi di Lampung dengan kondisi infrastruktur terhadap investasi swasta di daerah lain.

Berikut disajikan data investasi swasta di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.5. Perkembangan Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2004-2011.

Tahun	Jumlah Proyek		Nilai Investasi		Jumlah (Rp) PMA+PMDN
	PMA	PMDN	PMA (US\$)	PMDN (Rp)	
2004	8	2	280.406.939	618.000.000	2.524.280.451.000
2005	14	8	63.498.091	1.440.039.566.000	2.011.522.475.000
2006	10	13	178.282.567	3.763.050.000.000	5.367.593.103.000
2007	13	7	248.283.336	951.356.400.000	3.185.888.424.000
2008	2	7	19.557.747	622.635.916.800	798.655.640.000
2009	17	10	470.530.463	471.430.641.606	5.246.735.268.464
2010	36	53	624.724.659	7.583.944.825.370	13.206.466.756.370
2011	58	92	827.889.065	10.268.952.530.000	17.719.954.115.000

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

Provinsi Lampung

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah investasi di Provinsi Lampung yang berasal dari PMA dan PMDN di Provinsi Lampung dari tahun 2004 sampai 2011 mengalami fluktuasi. Perkembangan investasi yang fluktuasi ini membuat penulis ingin menganalisis lebih lanjut tentang keterkaitan antara belanja infrastruktur dengan investasi swasta (PMA dan PMDN) di Provinsi Lampung.

Adapun proyeksi kebutuhan investasi Provinsi Lampung tahun 2009-2014 dengan ekspektasi perkembangan moderat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Proyeksi Kebutuhan Investasi Tahun 2009-2014 Dengan Ekspektasi Perkembangan Moderat (dalam juta rupiah).

Tahun	*PDRB	Pertumbuhan PDRB	Kebutuhan Investasi	
			ICOR = 3	ICOR = 4
2009	35.567.010	1.497.371	4.492.113	5.989.484
2010	37.002.935	1.494.919	4.484.756	5.979.674
2011	38.438.860	1.491.428	4.474.283	5.965.711
2012	39.874.785	1.491.317	4.473.951	5.965.268
2013	41.310.711	1.487.186	4.461.557	5.948.742
2014	42.746.636	1.487.583	4.462.749	5.950.332

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa dengan ICOR = 3, kebutuhan investasi hingga 2014 mendatang adalah sebesar Rp.4,4 Triliun. Sedangkan dengan ICOR = 4, kebutuhan investasi adalah sebesar Rp.5,9 Triliun. Dengan kebutuhan investasi demikian, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat agar kebutuhan investasi tersebut dapat tercapai dengan baik.

Untuk menciptakan kondisi perekonomian dan suatu kondisi iklim usaha yang sehat perlu didukung dengan beberapa faktor. Seperti yang telah disajikan pada tabel 1.4. dimana faktor utama penghambat investasi adalah kebijakan ekonomi dan kondisi

makro ekonomi yang pengaturannya ada di pusat. Selain itu faktor lainnya adalah infrastruktur dimana kewenangan ada di pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting terhadap kondisi infrastruktur dalam menunjang investasi swasta.

Jika dilihat pada realitanya, saat ini infrastruktur di Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Salah satu kondisi infrastruktur yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur transportasi. Berikut merupakan kondisi infrastruktur transportasi jalan sampai Desember 2010 dan September tahun 2011 di Provinsi Lampung.

Tabel 1.7. Kondisi Ruas Jalan, Status Jalan Provinsi, Desember 2010.

Kondisi Jalan	%	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Mantap	48,618	33,178	15,440		
Tidak Mantap	51,281			14,326	36,955
Total (%)	100,00	33,178	15,440	14,326	36,955

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Tabel 1.8. Kondisi Ruas Jalan, Status Jalan Provinsi, September 2011.

Kondisi Jalan	%	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Mantap	53,58	37,09	16,49		
Tidak Mantap	47,84			13,60	34,24
Total (%)	101,42	37,09	16,49	13,60	34,24

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Data tersebut menggambarkan bagaimana kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Dapat dilihat pada tabel 1.8, sampai dengan Desember 2010 kondisi jalan mantap hanya mencapai 48,618%. Walaupun pada September 2011 kondisi jalan mantap terjadi perbaikan menjadi 53,58%, namun kondisi yang demikian belum mampu untuk menunjang suatu kondisi infrastruktur jalan yang ideal. Kondisi infrastruktur tentu tidak lepas dari belanja pemerintah daerah. Berikut merupakan belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur:

Tabel 1.9. Perkembangan belanja infrastruktur tahun 2004 – 2011.

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2004	102.290.933.482	99.146.460.733	96,92
2	2005	154.736.960.474	143.308.139.119	92,61
3	2006	314.327.404.982	281.522.942.568	89,56
4	2007	254.889.019.712	243.775.221.672	95,63
5	2008	221.479.255.005	219.446.571.836	99,08
6	2009	229.538.579.631	227.378.291.794	99,05
7	2010	378.375.812.655	373.874.490.740	98,81
8	2011	445.648.755.500	436.755.916.585	98,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Biro Keuangan Provinsi Lampung

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk dilakukan pengolahan adalah data realisasi belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah belanja untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur berupa jalan, irigasi, dan jaringan.

Dari penjelasan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Belanja Infrastruktur Terhadap Investasi Swasta (PMA dan PMDN) di Provinsi Lampung.” Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah penulis ingin menganalisis secara fokus hubungan antara belanja infrastruktur terhadap investasi swasta di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis melihat bagaimana hubungan belanja infrastruktur terhadap investasi. Setelah diketahui hasil, penulis juga akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat investasi di provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil survey Bank Dunia, infrastruktur memang bukanlah faktor utama dalam memengaruhi investasi. Namun penulis ingin menganalisis secara mendalam keterkaitan antara belanja infrastruktur terhadap investasi swasta di Lampung karena seperti yang dijelaskan pada tabel 1.4. bahwa kendali kewenangan infrastruktur ada di pusat dan daerah. Selain itu, variabel belanja sektor infrastruktur juga pernah dijadikan sebagai variabel yang dimasukkan pada penelitian terdahulu sebagai variabel yang memengaruhi investasi swasta. Maka hasil dari penelitian ini dapat kita bandingkan dengan penelitian terdahulu dengan objek lokasi penelitian yang berbeda.

B. Permasalahan

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan bank dunia, dikatakan bahwa salah satu penghambat masuknya investasi swasta di suatu daerah adalah infrastruktur.

Mudrajad Kuncoro menjelaskan bahwa infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur ekonomi, infrastruktur pertanian, infrastruktur sosial, infrastruktur kesehatan, infrastruktur energi, dan infrastruktur telekomunikasi. Supaya penelitian ini dapat lebih fokus, maka penelitian ini tidak menjawab bagaimana hubungan semua cakupan infrastruktur tersebut terhadap investasi di Lampung. Penulis lebih memfokuskan pada belanja infrastruktur yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana hubungan belanja sektor infrastruktur (jalan, irigasi, dan jaringan) terhadap investasi swasta di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis hubungan belanja infrastruktur (jalan, irigasi, dan jaringan) dengan investasi swasta di Provinsi Lampung.
2. Mengukur keeratan dan signifikansi korelasi antara belanja infrastruktur dengan investasi swasta di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan fiskal ekspansioner (defisit anggaran). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

Seperti dijelaskan di awal, belanja atau pengeluaran merupakan instrumen dalam kebijakan fiskal. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan daerah serta menyediakan belanja dan pelayanan publik. Penyediaan barang dan jasa publik disediakan oleh pemerintah yang berasal dari APBN dan/atau APBD pada pos belanja. Dalam penelitian ini, variabel utama yang digunakan adalah pengeluaran/belanja pemerintah yang merupakan pilar dalam kebijakan fiskal.

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pada penyediaan barang dan jasa. Barang yang disediakan oleh pemerintah disebut barang publik (*public goods*), sedangkan jasa yang disediakan oleh pemerintah disebut pelayanan publik. Keduanya disediakan pemerintah agar dapat dikonsumsi oleh publik tanpa dipungut biaya secara langsung dan siapa saja boleh menggunakannya. Biaya yang diperoleh untuk menyediakan barang dan jasa publik diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat atau wajib pajak.

Salah satu barang publik yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat adalah infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur

merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi supaya biaya finansial tidak membengkak.

Dampak atas kondisi infrastruktur adalah terciptanya kelancaran dalam mobilitas masyarakat, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan tercipta kondisi keadilan sosial bagi masyarakat banyak. Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi.

Sementara peran pendukung dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

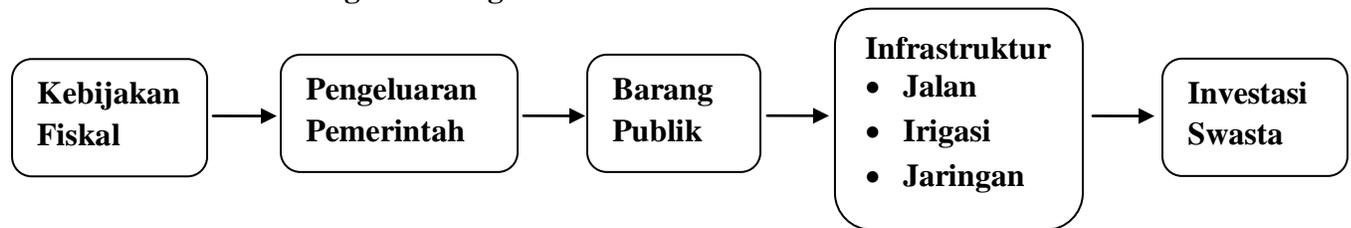
Sedangkan bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Salah satu pilar pendukung untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang baik adalah investasi swasta, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Investasi yang baik dalam suatu daerah akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menekan laju pengangguran. Selain itu dengan tingkat investasi yang tumbuh positif, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Dalam kerangka ini maka infrastruktur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat, serta dalam jangka

panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju kondisi masyarakat yang sejahtera dan merata. Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran penelitian.

Gambar 1.3. Bagan Kerangka Pemikiran.



E. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diduga terdapat hubungan yang positif dan erat antara belanja infrastruktur dengan tingkat investasi swasta (PMA dan PMDN) di Provinsi Lampung.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Studi Empiris yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian terdiri atas jenis dan sumber data, alat analisis, gambaran umum Provinsi Lampung, batasan variabel, dan metode analisis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA